



Towards Sustainable Development: Formulating SDGs-Based Village RPJM in Bandung Village, Pandeglang

Menuju Pembangunan Berkelanjutan: Penyusunan RPJM Desa Berbasis SDGs di Desa Bandung, Pandeglang

Tanda Setiya¹, Yuniarto Hadiwibowo², Taufik Raharjo^{3*}, Nur Aisyah Kustiani⁴

^{1,3}Program Studi Diploma III Manajemen Aset, Politeknik Keuangan Negara STAN

²Program Studi Diploma IV Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁴Program Studi Diploma III Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN

E-Mail: taufik.raharjo@pknstan.ac.id

Makalah: Diterima 29 April 2025; Diperbaiki 28 Mei 2025; Disetujui 24 September 2025
Corresponding Author: Taufik Raharjo

Abstrak

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah pendampingan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) berbasis SDGs Desa Bandung, Pandeglang. Agar mencapai hasil yang optimal, kegiatan PKM ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan menggunakan pendekatan Focus Group Discussion (FGD) dengan pihak mitra, untuk mengidentifikasi sasaran, tujuan, luaran yang diharapkan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan dengan memperhitungkan penggunaan sumber daya yang tepat, menyusun jadwal pelaksanaan, dan merancang tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan, termasuk pembagian tugas antara pengabdian dan mitra. Dalam perencanaan ditetapkan metode pelaksanaan PKM dengan menggunakan pendekatan pendampingan kepada pemerintah Desa Bandung. Pendampingan dilakukan dengan mengundang beberapa pihak, mulai dari perangkat desa hingga tokoh Masyarakat untuk penyusunan peta jalan Pembangunan Desa dengan basis SDGs Desa terlebih dahulu. Evaluasi merupakan kegiatan terakhir PKM ini. Dalam evaluasi didapatkan bahwa pemerintah desa tidak mempunyai data yang lengkap untuk digunakan dalam menyusun RPJM Desa maupun peta jalan Pembangunan Desa berbasis SDGs. Sehingga tim kesulitan untuk menyusun berkas RPJM dan Peta Jalan Pembangunan Desa. Salah satu solusinya adalah perlu adanya input kekurangan data SDGs dalam aplikasi SDGs Desa milik Kementerian Desa PDTT. Namun, hingga akhir kegiatan pengabdian ini pihak Pemerintah Desa belum selesai menginput data dimaksud, karena kesibukan lain seperti mempersiapkan lokasi wisata desa Bandung yang akan dibuka di akhir tahun 2023.

Keyword: Desa, Pembangunan Berkelanjutan, RPJM, SDGs

Abstract

The purpose of this community service activity (PKM) is to assist in preparing the Village Medium-Term Development Plan (RPJM Desa) based on the SDGs of Bandung Village, Pandeglang. To achieve optimal results, this PKM activity is carried out in three stages, namely planning, implementation, and evaluation. The planning stage uses the Focus Group Discussion (FGD) approach with partners, to identify targets, objectives, expected outputs, and activity implementation schedules by calculating the use of appropriate resources, preparing implementation schedules, and designing other actions needed to achieve goals, including the division of tasks between the community service and partners. In the planning, the PKM implementation method is determined using a mentoring approach to the Bandung Village government. Mentoring is carried out by inviting several parties, from village officials to community leaders to prepare a Village Development roadmap based on the Village SDGs first. Evaluation is the last activity of this PKM. In the evaluation, it was found that the village government did not have complete data to be used in preparing the Village RPJM or the Village Development roadmap based on the SDGs. So the team had difficulty compiling the RPJM files and Village Development Roadmap. One solution is the need to input the lack of SDGs data in the Village SDGs application owned by the Ministry of Villages, Disadvantaged Regions, and Transmigration. However, until the end of this community service activity, the Village Government had not finished inputting the data in question, because of other activities such as preparing the Bandung village tourist location which will be opened at the end of 2023.

Keyword: Village, Sustainable Development, RPJM, SDGs

1. Pendahuluan

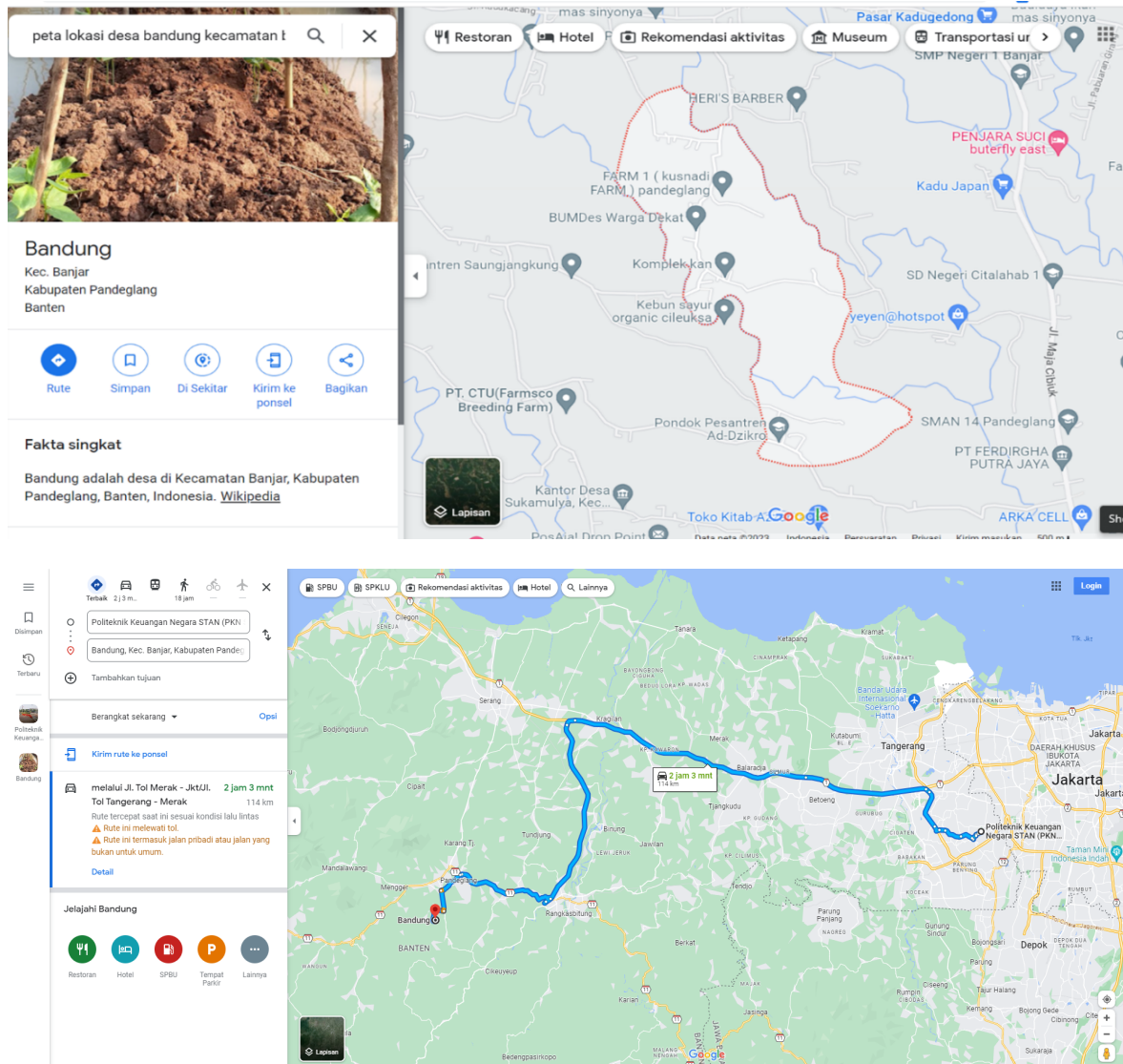
Desa merupakan suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya [1]. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah. Jika menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 [2] atau lebih dikenal dengan Undang-Undang, Desa artikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasca implementasi Undang-Undang Desa, paradigma pembangunan desa mengalami perubahan yang drastis, dari menjadi desa sebagai objek, berubah menjadi desa sebagai subjek dan objek sekaligus [3]. Hal ini terlihat dari realisasi dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya dengan membawa konsekuensi peningkatan program pembangunan perdesaan yang agresif, sehingga perlu adanya capaian yang dapat direncanakan dan diukur. Tujuan pembangunan perdesaan ini akhirnya terangkum dalam 18 tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang mana lebih sering disebut SDGs (Sustainable Development Goals) Desa.

SDGs Desa ini merupakan bentuk dukungan kepada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (selanjutnya ditulis sebagai TPB) Nasional yang merupakan turunan dari agenda besar konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2012 yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai arah TPB, maka TPB ini diturunkan lagi hingga level daerah (Provinsi dan Kota/Kabupaten). Hal ini tentu untuk mencapai pembangun desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa dan kualitas manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan [4]. Meski demikian, pembangunan desa harus selaras dan adaptif terhadap kondisi lokal. Oleh karena itu, kebijakan SDGs perlu diintegrasikan dengan kebijakan setempat untuk merumuskan solusi atas berbagai permasalahan kompleks di desa. Selain itu, penguatan hubungan antara kota dan desa dapat mendorong perkembangan ekonomi pedesaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan para petani di daerah tersebut [3]. SDGs Desa merupakan role Pembangunan berkelanjutan yang masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 [5].

Melihat aspek kewilayahan dan kependudukan, wilayah desa di Indonesia ternyata mencapai 91 persen wilayah Indonesia dan jumlah penduduk desa mencapai 43 persen dari total seluruh penduduk Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa persoalan pembangunan dan potensi di Indonesia itu ada di desa. Jika permasalahan sosial-ekonomi di perdesaan dapat teratasi, maka sebagian besar tantangan pembangunan di Indonesia akan terselesaikan [3]. Oleh karena itu, merupakan suatu pilihan yang tepat jika konsep SDGs ini diterapkan di wilayah perdesaan dengan sentuhan lokal dapat direncanakan dan dicapai dengan sebaik mungkin. Mengingat pentingnya SDGs Desa ini, maka Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) terjun langsung untuk mengawal program SDGs Desa ini, dengan harapan masyarakat desa bukan lagi menjadi masyarakat yang termarginalkan, namun mampu menjadi tulang punggung Negara Indonesia. Untuk merealisasikan cita-cita penerapan SDGs Desa tersebut, maka Kementerian Desa PDPT berkerjasama dengan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) dalam berbagai kegiatan.

Politeknik Keuangan Negara STAN sebagai salah satu perguruan tinggi yang mengemban amanah pengabdian kepada masyarakat telah mendapatkan tantangan dari Menteri Desa PDPT untuk membantu dalam mencapai tujuan SDGs Desa di desa-desa di Indonesia. Untuk menjawab tantangan itu, maka tim pengabdian bekerjasama dengan instansi terkait melaksanakan pendampingan implementasi SDGs Desa di Provinsi Banten dan dimulai di desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang yang berjarak sekitar 114 km. Desa Bandung yang dijadikan objek pengabdian karena desa ini merupakan desa terbaik di Provinsi Banten dan bersedia sebagai piloting implementasi SDGs Desa di wilayah Provinsi Banten.



Gambar 1. Peta Lokasi Objek Pengabdian Kepada Masyarakat

Program pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendampingan. Program pendampingan implementasi SDGs Desa ini merupakan rangkaian kegiatan yang cukup panjang (hingga tahun 2030), namun untuk mempermudah implementasi hingga jangka panjang tersebut. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam paper ini merupakan tahap pertama dari serangkaian tahap PKM. Pada tahap pertama dilaksanakan pendampingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Deas) dan akan dilanjutkan dengan program PKM SDGs Desa lain (penyusunan peta jalan, penyusunan anggaran berbasis SDGs Desa) hingga tuntas menuju Desa Mandiri SDGs Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) disusun sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Dokumen ini menjadi panduan pembangunan selama enam tahun, berdasarkan visi dan misi kepala desa yang terpilih. Pendekatannya mengintegrasikan pendekatan top-down dengan bottom-up, di mana program pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah desa dibahas kembali melalui forum politik desa. Untuk mewujudkan kebijakan pembangunan yang efektif, penyusunan RPJM-Desa perlu mendapatkan dukungan lebih kuat dari berbagai elemen Masyarakat [6]. Partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, hingga pemantauan dan evaluasi, diperlukan untuk mewujudkan perencanaan yang demokratis, transparan, dan akuntabel sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2008. Pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama (stakeholders) dalam perencanaan pembangunan partisipatif diterapkan karena masyarakat dianggap paling memahami kebutuhan, pola pikir, sistem nilai, perilaku, serta adat istiadat dan kebiasaan di lingkungannya. Peran menggerakkan masyarakat dalam Pembangunan inilah yang harus diambil oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) [7].

2. Metode

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat PKN STAN, secara garis besar, tim pengabdian melaksanakan pendampingan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) berbasis SDGs. Keberhasilan kegiatan PKM ini dilihat dengan indikator tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) berbasis SDGs Desa secara tepat waktu.

Menjawab kebutuhan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) berbasis SDG di desa Bandung, maka Pemerintah desa Bandung perlu diberikan bantuan dalam menyusun dokumen-dokumen dimaksud. Tim PKM PKN STAN yang diwakili oleh tim pengabdian memberikan pendampingan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) berbasis SDGs. Format kegiatan dengan pendekatan pendampingan ini lebih efektif jika dibandingkan dengan pelatihan maupun seminar yang belum mampu memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Bandung.

Metode yang digunakan dalam program PKM ini ada beberapa. Metode pendampingan secara online sifatnya lebih ke sosialisasi atas pemahaman tentang SDGs Desa kepada perangkat desa terkait. Setelah dilakukan sosialisasi secara online dilanjutkan dengan metode pendampingan secara langsung di Desa Bandung untuk Perangkat desa. Metode pendampingan langsung dilakukan dengan diskusi awal atas beberapa hal terkait RPJM Desa yang telah disusun. Dari diskusi tersebut dilanjutkan dengan pendampingan untuk menata ulang RPJM Desa agar sesuai dengan SDGs Desa.

Coaching dilakukan secara *man to man* untuk memastikan bahwa perangkat desa bisa mengerti cara tagging dan bagaimana menganalisa data SDGs Desa baik yang di dashboard maupun sumber lain untuk bisa dijadikan dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan desa RPJM.

Pendampingan secara langsung dilakukan pada 10 sampai dengan 12 Oktober 2023, sedangkan pendampingan secara daring dilaksanakan mulai tanggal 13 Oktober sampai dengan 8 Desember 2023. Untuk mendapatkan hasil yang baik, maka pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

2.1 Perencanaan

Perencanaan kegiatan PKM dilaksanakan dengan Focus Group Discussion (FGD) dengan pihak mitra, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Desa Bandung serta Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) PKN STAN. Tujuan dari perencanaan kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi sasaran, tujuan, luaran yang diharapkan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan dengan memperhitungkan penggunaan sumber daya yang tepat, menyusun jadwal pelaksanaan, dan merancang tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan, termasuk pembagian tugas antara pengabdian dan mitra.

2.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut kegiatan perencanaan guna mencapai tujuan kegiatan PKM ini. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan ini adalah pendampingan secara langsung maupun tidak langsung. Pendampingan tidak langsung dilakukan dengan bantuan aplikasi pertemuan daring.

2.3 Evaluasi

Evaluasi dalam kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir yang merupakan proses memberikan nilai dan mengukur capaian kegiatan PKM. Evaluasi dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan menelaah kembali capaian PKM yang dibandingkan dengan tujuan awal kegiatan.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan PKM ini dimulai sejak bulan Oktober 2023 hingga bulan Desember 2023. Luaran kegiatan ini adalah terselenggaranya pendampingan penyusunan RPJM Desa berbasis SDGs kepada Pemerintah Desa Bandung. Hasil kegiatan PKM ini secara jelas dapat digambarkan sebagai berikut ini.

Setelah dilakukan pendampingan Penyusunan RPJM Desa yang berbasis SDGs Desa, pada akhirnya desa yang selama ini dalam menyusun RPJM Desa belum pernah memperhatikan data SDGs Desa kini telah memiliki perencanaan Pembangunan desa yang berbasis pada data SDGs Desa.

Salah satu penyebab desa belum menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis SDGs adalah karena pemahaman dan kemampuan Perangkat Desa tentang SDGs masih rendah bahkan belum memiliki kemampuan sama sekali. Sehingga, selanjutnya dilakukan pendampingan dengan diawali dari pemberian pemahaman tentang apa itu SDGs, kegunaan/manfaat dan dampaknya terhadap pembangunan di desa, maka kemampuan tersebut meningkat. Perangkat desa mulai memahami 17 SDGs desa dan selanjutnya bisa menetapkan kegiatan dan program pada dokumen perencanaan desa mana yang sesuai dengan 17 tujuan SDGs.

Selain itu dalam hal penggunaan aplikasi dashboard SDGs desa yang selama ini lebih diserahkan kepada pendamping desa, setelah pendampingan ini perangkat desa telah mampu mengoperasikan aplikasi Dashboard SDGs Desa. Di sisi lain, faktor penghambat implementasi RPJM Desa berbasis SDGs adalah belum adanya aplikasi yang bisa melakukan tagging atas program dan kegiatan pembangunan desa yang dialokasikan pada APB Desa. Aplikasi pada dashboard SDGs Desa disusun dengan pendekatan kuantitatif sehingga tidak bisa serta merta dijadikan rujukan untuk menyusun RPJM Desa yang berbasis data SDGs. Selain itu data yang diinput pada SDGS Desa juga masih belum maksimal, sehingga hasil olah data pada aplikasi dashboard SDGS desa belum bisa merepresentasikan kondisi riil, dan ini tentu tidak tepat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di desa.

Untuk saat ini mitigasi yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan tagging secara manual atas dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa. Atas dasar hal tersebut disandingkan dengan hasil dari dashboard SDGS Desa. Selanjutnya dijadikan alat analisis awal sebelum dibawa kepada Musyawarah Desa (MusDes) untuk didiskusikan lebih konkret dalam Musdes Perencanaan Pembangunan Desa. Disini harus lebih fleksibel karena kondisi kebutuhan masyarakat yang sering berubah juga mewarnai pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan desa. Intinya harus ada fleksibilitas dalam perencanaan pembangunan desa tidak ahanya berdasar kepada data kuantitatif yang ada namun juga memperhatikan data-data kualitatif dari semua pemangku kepentingan di desa.

3.1 Perencanaan

Perencanaan ini diperlukan agar mengetahui tujuan setiap tahap kegiatan pengabdian, target luaran yang diinginkan, target waktu penyelesaian, dan pembagian tugas antara pengabdian dan mitra. Tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan ini adalah membantu mitra agar mampu menyusun RPJM Desa berbasis SDGs Desa.

Pembagian tugas dilakukan antara pihak pengabdian dan mitra. Dalam hal ini, pengabdian membuat konsep kegiatan dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang ada, sedangkan mitra melaksanakan konsep kegiatan tersebut. Pembuatan konsep kerja ini dilaksanakan dengan mekanisme musyawarah yang melibatkan para pihak terkait. Dalam prosesnya, para pihak terkait dalam proses pengabdian ini perlu untuk saling mendukung baik dari Pemerintah Desa maupun Pengabdian [8]. Pengabdian dalam prosesnya menempatkan diri sebagai fasilitator, sehingga diharapkan mitra dapat secara mandiri melakukan analisis masalah, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dilakukan supaya kemandirian masyarakat dapat tercipta [9]. Dalam perencanaan ini tim pengabdian membuat konsep kegiatan pendampingan penyusunan RPJM Desa.

3.2 Pendampingan

Pendampingan langsung dilaksanakan di aula Desa Bandung pada 10 Oktober 2023 hingga 12 Oktober 2023. Pendampingan dilakukan dengan mengundang beberapa pihak, mulai dari perangkat desa hingga tokoh masyarakat. Mengingat ada agenda besar lain yang tidak kalah penting, yaitu penyusunan peta jalan desa dengan basis SDGs Desa, maka pendampingan juga langsung mengarah pada penyusunan peta jalan Pembangunan Desa dengan basis SDGs Desa.



Gambar 2. Pendampingan (Sosialisasi SDGs Desa)



Gambar 3. Pendampingan dengan melibatkan pemerintah desa dan tokoh masyarakat

3.3 Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan terakhir PKM ini. Dalam evaluasi ini didapatkan bahwa pemerintah desa tidak mempunyai data yang lengkap untuk digunakan dalam menyusun RPJM Desa maupun peta jalan Pembangunan Desa berbasis SDGs, sehingga tim kesulitan untuk menyusun berkas RPJM dan Peta Jalan Pembangunan Desa. Solusi yang diidentifikasi oleh tim pengabdian adalah perlu adanya input kekurangan data SDGs dalam aplikasi SDGs Desa milik Kementerian Desa PDTT. Oleh karena itu Desa Bandung harus melaksanakan pendataan dengan kuesioner SDGs pada level individu, keluarga, RT dan desa. Namun, hingga akhir kegiatan pengabdian ini pihak Pemerintah Desa belum selesai menginput data dimaksud, karena kesibukan lain seperti mempersiapkan lokasi wisata desa Bandung yang akan dibuka di akhir tahun 2023.

Mengingat pentingnya pendataan melalui kuesioner SDGs tersebut, maka tim pengabdian merekomendasikan kepada pemerintah Desa Bandung untuk mengupayakan kesiapan data kuesioner pada tahun 2024, sehingga penyusunan RPJM Desa dan Peta Jalan SDGs Desa dapat dilaksanakan. Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan mahasiswa untuk membantu penyusunan RPJM Desa dan Peta Jalan SDGs Desa seperti yang dilakukan oleh Husain et al. [10] serta Ahmad & Febriyanti [11].

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian ini telah direncanakan dan dilaksanakan dengan tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Setiap tahap telah dilaksanakan dengan baik untuk mendapatkan hasil terbaik. Tahap perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas FGD dengan pihak DPMD Kabupaten Pendelegang dan Pemerintah Desa Bandung. Mendasarkan kepada analisis dan realitas di lapangan PKM ini menyimpulkan bahwa pemerintah desa bersedia dan berkenan untuk menyusun RPJM Desa yang sesuai dengan SDGs Desa. Setelah dilakukan pendampingan dengan seksama dan terukur pemerintah desa memiliki kemampuan dan pemahaman untuk menyusun perencanaan pembangunan desa berbasis SDGs Desa.

Tahap pelaksanaan menemui kendala yaitu, kurangnya data SDGs Desa yang seharusnya sudah diinput dalam aplikasi SDGs Desa, sehingga tim kesulitan untuk menyusun konsep RPJM dan Peta Jalan Pembangunan Desa. Salah satu solusinya adalah perlu adanya pendataan dan input kekurangan data SDGs dalam aplikasi SDGs Desa milik Kementerian Desa PDTT. Data tagging SDGs Desa dan dashboard SDGs Desa belum mencukupi untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa sehingga pemerintah desa harus mampu menggali informasi lain agar melengkapi data guna penyusunan RPJM Desa yang berbasis SDGs Desa. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan tagging secara manual dengan Excel dan penggalan informasi melalui Musrenbangdes.

Kedepan PKM seperti ini harus dilanjutkan untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan perangkat desa guna memanfaatkan RPJM Desa dalam penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Selain itu Pemerintah Pusat dan Daerah bisa menyediakan data tagging SDGs Desa dan rekomendasi yang lebih valid sehingga bisa langsung dirujuk sebagai dasar menyusun perencanaan pembangunan desa.

Agar kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dapat berdampak lebih, maka kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan berupaya mengatasi kendala sehingga program ini dapat berkelanjutan. Secara konkret, di masa mendatang mitra perlu dibantu dalam hal penyusunan dokumen Penganggaran Berbasis SDGs Desa, penyusunan pengukuran, monitoring dan evaluasi, pengawasan implementasi SDGs Desa, dan Pengembangan SDGs Desa Menuju Desa Global.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Politeknik Keuangan Negara STAN yang telah memberikan fasilitas pendanaan dalam kegiatan ini. Terima Kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pendeglang dan Pemerintah Desa Bandung yang telah memberikan dukungan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini hingga mendapatkan hasil terbaik.

Referensi

- [1] R. Bintarto, "Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya," 1983, *Ghalia Indonesia*, Yogyakarta.
- [2] *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- [3] A. H. Iskandar, *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- [4] P. Prahati, S. Zuhdi, and A. Aguswan, "Penyuluhan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar," *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 1, pp. 94–99, 2017.
- [5] L. Boekoesoe and T. S. Maksun, "Optimalisasi Pembangunan Desa dalam Mewujudkan SDGs Desa," *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, vol. 11, no. 1, pp. 209–218, 2022.
- [6] T. A. Wulansari, "Peran Masyarakat Desa Landungsari Kabupaten Malang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) TAHUN 2013-2019," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, vol. 4, no. 3, 2015.
- [7] I. W. Sutrisna, "Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa," *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, vol. 4, no. 1, pp. 1–10, 2021.
- [8] T. Raharjo and M. Setiawan Kusmulyono, "Pendekatan Asset-Based Community Development dalam Mengelola Bumdesa di Desa Cibogo, Kabupaten Tangerang," *PERWIRA-Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia*, vol. 4, no. 2, pp. 91–102, 2021.
- [9] A. A. Yudanto, T. Raharjo, and R. S. Ubed, "Pendampingan pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan pada usaha berbasis komunitas desa cibogo," *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 2, pp. 341–346, 2018.
- [10] N. Husain, M. Rohandi, M. Latief, A. Mulyanto, A. A. Bouty, and A. A. Kadim, "Pendampingan masyarakat Desa Lakeya dalam Pencapaian SDGs Desa," *Sains dan Teknologi*, vol. 1, no. 2, pp. 31–37, 2022.
- [11] J. Ahmad and F. Febriyanti, "Pemberdayaan Aparat Desa Dalam Optimalisasi Program Kerja Pada RKP dan RPJM Desa Sebagai Upaya Percepatan Pencapaian SDGs Untuk Mendukung Program Desa Membangun," *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, vol. 10, no. 3, pp. 591–606, 2021.